

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada berbagai fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit, pluralitas etnis, pluralitas agama, dan pluralitas bahasa. Keberagaman ini seringkali menjadi pemicu konflik. Menjembatani kesenjangan ini membutuhkan berbagai jenis akomodasi yang dapat menyatukan perbedaan tersebut sehingga ada pemahaman dan pengakuan akan keberadaan suatu budaya. Dalam konteks Indonesia, hal ini identik dengan pluralisme. Meskipun pada akhirnya, berbagai masalah tentunya dapat menimbulkan konflik sosial.¹ Mengenai pluralisme, Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²

¹ Asrul Muslim, “Interaksi Sosial dalam Masyarakat Multietnis,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (29 November 2013), hlm. 485.

² al-Qur’an Kemenag, diakses pada 21 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

Di sisi lain, keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa sangat rentan terhadap konflik dan perpecahan. Seperti yang dikatakan Nasikun³, pluralitas masyarakat Indonesia setidaknya dapat dilihat melalui dua ciri unik: pertama, secara horizontal, ditandai dengan adanya unit-unit sosial berdasarkan perbedaan suku, agama, adat, dan perbedaan daerah. Kedua, secara vertikal, ditandai dengan adanya perbedaan vertikal yang tajam antara strata atas dan strata bawah.

Adanya pluralisme di Indonesia menyebabkan lahirnya identitas di dalam setiap kelompok. Dasar kesadaran identitas merupakan cikal bakal lahirnya peradaban, sedangkan jika kita melihat dasar kesadaran identitas negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, perbedaannya sangat jelas. Negara-negara Barat bercirikan individualistik⁴, humanistik⁵, dan sekuler⁶, sedangkan

³ Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (27 Juni 2016), hlm. 31.

⁴ Individualistik ialah pandangan yang menyatakan bahwa kesatuan bukanlah hal yang penting, tetapi yang lebih penting ialah keanekaragaman di masyarakat. Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Kencana, 2013), hlm. 12.

⁵ Humanistik merupakan bagian dari psikologi yang mana suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Ratna Syifa Rachmahana, "Psikologi Humanistik dan Aplikasinya dalam Pendidikan," *El-Tarbawi* 1, no. 1 (2008), hlm. 100.

⁶ Sekuler atau sekulerisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama-wahyu atau supranaturalis. Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk sekularisme* (Grasindo, 2010), hlm. 4.

masyarakat Indonesia bercirikan individual-sosial⁷, humanis-religius⁸, dan religius⁹. Maka wajar jika pada tataran implementasinya, seperti demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat karena landasan kesadaran akan identitas keduanya sangat berbeda. Sebagai dasar kesadaran identitas suatu bangsa (individualis-sosialis, humanis-religius, religius) masih sifatnya. Namun, pemahaman dan implementasinya harus selalu dinamis, dari sini akan muncul konotasi primitif dan modern. Istilah primitif dan modern sama sekali tidak menunjukkan baik atau buruk, atau maju dan tertinggal, hanya saja perilaku demokrasi adalah produk peradaban modern.¹⁰

Jika melihat daerah manapun di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan yang biasa disebut Banjar secara umum atau Kota Banjarmasin secara khusus sebagai suatu kota. Masyarakat Kota Banjarmasin memiliki unsur budaya yang dominan, yaitu dalam bahasanya merupakan Bahasa Banjar dan dalam agamanya adalah Islam. Oleh karena itu, wajar jika Budaya Banjar juga terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai Budaya Banjar dalam

⁷ Individual-sosial yaitu suatu proses perubahan dari individu untuk diterima atau sesuai dengan keinginan dari pihak luar dunia luar Aris, "Pengertian Sosialisasi: Fungsi, Tujuan, dan Prosesnya - Grameia Literasi," diakses 16 Mei 2024, <https://grameia.com/literasi/pengertian-sosialisasi/>.

⁸ Humanis-religius adalah konsep beragama yang menempatkan manusia sebagai manusia yang mempunyai norma agama atau nilai keagamaan, serta upaya humanisme dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Ghoyatul Ianah, *Pendidikan Humanisme Religius* (Penerbit NEM, 2022), hlm. 52–53.

⁹ Religius ialah taat pada agama dan kepercayaan atau keyakinan pada kekuatan kodrati di atas kemampuan manusia. Imam Musbikin, *Tentang Pendidikan Karakter dan Religius Dasar Pembentukan Karakter* (Nusameia, 2021), hlm. 34.

¹⁰ Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Transnasional* 4, no. 2 (23 Mei 2013), hlm. 882.

hubungan manusia satu sama lain juga terkait dengan sistem kekerabatan dan pandangan keagamaan (Islam) masyarakat Banjar.¹¹

Berbicara tentang politik di Kota Banjarmasin, pasca Orde Baru melahirkan gerakan kelompok Islam untuk menemukan identitas politiknya setelah berbagai partai Islam dan kelompok Islam bermunculan seiring dengan terbukanya kebebasan politik. Di sini, gerakan kelompok Islamis dapat dibedakan menjadi dua tipologi, yaitu (1) Islamisasi total atau pengislaman secara keseluruhan dengan mengembalikan sistem politik ke era kekhalifahan Islam. Tipologi ini dapat diwakili oleh kelompok Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); (2) Islamisasi yang tetap memperhatikan negara-bangsa Indonesia bertujuan dalam arti membentuk negara Islam Indonesia.¹²

Memikirkan apa yang terjadi di Kota Banjarmasin secara umum melahirkan pola politik identitas yang seharusnya menyatu dengan politik kebangsaan, politik negara yang tidak lagi mengutamakan egoisme sektoral (kepentingan daerah), egoisme kelompok (kepentingan kelompok), dan egoisme partikularistik (kepentingan pribadi) karena politik kebangsaan, politik negara, dan politik nasionalis berlandaskan Pancasila karena ideologi negara adalah lambang dari politik kebhinekaan yang mengikat kebhinekaan, tetapi untuk persatuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepakatan untuk memastikan bahwa Indonesia milik

¹¹ Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenus," *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* 5, no. 1 (2014), hlm. 5.

¹² Irfan Noor, "Islam dan Representasi Identitas Banjar Pasca Orde Baru di Kalimantan Selatan," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (14 Agustus 2012), hlm. 143.

bersama, menghapuskan asas penguasaan atas apa pun, kesetaraan kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat, perdamaian atas asas *tepo seliro* atau senggang rasa/saling menghargai berdasarkan ideologi Pancasila yang akan melingkupi kebhinekaan dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warga negara tanpa ada pelabelan bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.¹³

Apalagi aksi politik identitas yang masif terlihat ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 mampu menarik perhatian publik tidak hanya di Jakarta yang melaksanakan pilkada, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia. Alhasil, kontes Pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai isu SARA karena adanya perbedaan mencolok antara calon satu dengan calon lainnya. Politik identitas menjadi isu hangat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 karena diyakini bahwa cara termudah dan paling efektif untuk membuat orang memilih seorang kandidat adalah dengan membangkitkan keterikatan emosional pemilih dengan kandidat tersebut.¹⁴

Pilkada telah menjadi arena tumbuhnya pergulatan antara kekuatan sosial-politik yang seringkali didasarkan pada sentimen etnis dan agama. Meskipun laporan “Tahunan Kehidupan Beragam” di Indonesia yang diterbitkan oleh CRCs pada tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat kekerasan dalam pilkada terkait konflik antarkomunal relatif rendah. Namun, perlu diwaspadai karena politik

¹³ Leli Salman Al-Farisi, “Politik Identitas: Ancaman terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila,” *Aspirasi* 10, no. 2 (21 Februari 2020), hlm. 78.

¹⁴ Dina Lestari, “Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia,” *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (10 Juni 2019), hlm. 12.

identitas dalam pilkada tidak berdampak langsung pada kekerasan komunal. Akan tetapi, berpotensi menimbulkan antagonisme dan polarisasi di masyarakat yang dilandasi oleh sentimen komunal. Apalagi dalam masyarakat yang heterogen yang tersegregasi atas dasar suku, agama, dan budaya.¹⁵

Sebagai contoh di Indonesia, Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 menampilkan politik identitas agama yang dilakukan oleh orang Islam. Hal ini muncul tidak lain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemeluk agama Protestan, mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta yang mana sebanyak 83,67% penduduk DKI Jakarta beragama Islam.¹⁶ Masyarakat menolak Ahok menjadi gubernur yang mana sebenarnya dilatarbelakangi kasus penistaan agama yang Ahok lakukan terhadap agama Islam.¹⁷ Meskipun politik identitas agama yang terjadi di Jakarta tidak dilakukan oleh lawan politik Ahok secara langsung, tetapi bagaimana politik identitas agama mampu memengaruhi banyak orang sehingga Ahok kalah di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 karena kalah dari Anies Baswedan yang memperoleh 57,95% suara.¹⁸

Dengan demikian, perlu adanya norma hukum untuk mengatur lintas kultural etnis dan agama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai

¹⁵ Idham dan Suaib Amin Pranowo, "Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya," *Jurnal Renaissance* 5, no. 2 (24 Desember 2020), hlm. 651.

¹⁶ "Satu Data - Kementerian Agama RI," ddiakses 16 Maret 2024, <https://satudata.kemendagri.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.

¹⁷ Kompas Cyber Media, "Apa itu Politik Identitas dan Contohnya," KOMPAS.com, 13 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/14/01150031/apa-itu-politik-identitas-dan-contohnya>.

¹⁸ "KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017," ddiakses 16 Maret 2024, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta.

forum dari kumpulan putra-putri anak bangsa memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan serta persatuan¹⁹ pada Pemilu 2024, salah satunya di Kota Banjarmasin. Maka dari itu, FKUB sebagai komunitas yang dipayungi oleh pemerintah daerah melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) diharapkan mampu menanggulangi politik identitas pada Pemilu 2024, terkhusus di Kota Banjarmasin.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, salah satu tugas FKUB tingkat kota ialah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun ada pembatasan ‘bidang keagamaan’, tetapi jika merujuk pada asas pemilu, sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, asas bebas memiliki arti bahwa “setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan

¹⁹ Nurfin Sihotang, “Peran Strategis FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Membangun Karakter Bangsa: Menurut Perspektif Islam,” *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 1 (2012), hlm. 16–17.

pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.”²⁰

Artinya, FKUB Kota Banjarmasin setidaknya juga ikut terlibat dalam memberikan sosialisasi terkait kebebasan warga negara dalam partisipasi hak pilih politik agar sesuai dengan asas bebas, sekaligus melakukan kerja sama dengan lembaga terkait. Sebagaimana observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai Ketua FKUB Kota Banjarmasin, Dr. H. Maskur, M.M., menjelaskan bahwa sebenarnya politik identitas tidak dapat dihilangkan dan tetap melekat pada individu masing-masing. Adapun yang terpenting, tidak mengadili maupun menyudutkan identitas orang lain dalam perpolitikan mengenai agama maupun kelompok lainnya. Adapun posisi FKUB di sini tetap pada jalurnya, yaitu membawa kesejukan pada suasana politik yang berjalan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan yang ada di Pancasila, terutama sila ketiga. Terakhir, FKUB tidak memiliki hak untuk melarang para calon legislatif maupun eksekutif agar tidak menggunakan atribut politik identitas karena hal ini menyangkut masalah privasi.²¹

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat

²⁰ Tim Hukumonline, “Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu,” hukumonline.com, diakses 25 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>.

²¹ Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Banjarmasin, Maskur melalui WhatsApp pada 18 Oktober 2023.

Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama pada Pemilu 2024.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama pada Pemilu 2024?
2. Apa saja masalah dan strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama pada Pemilu 2024?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Ingin mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama pada Pemilu 2024.
2. Ingin mengetahui masalah dan strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama pada Pemilu 2024.

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bertujuan menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bertujuan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Peran atau Peranan memiliki arti fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.²² Peran atau Peranan yang dimaksud ialah peran FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama.
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ialah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.²³ FKUB yang dimaksud ialah FKUB Kota Banjarmasin.
3. Menanggulangi berasal dari kata antisipasi ialah membuat perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi;

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1155.

²³ “Ka.Kankemenag: FKUB Selesaikan Persoalan Kerukunan Umat Beragama,” diakses 18 Juni 2023, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/576763/KaKankemenag-FKUB-Selesaikan-P>.

membayangkan.²⁴ Menanggulangi yang dimaksud ialah menghalangi politik identitas agama pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin.

4. Politik Identitas ialah konsep dan gerakan politik yang akar perhatiannya terfokus pada perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama.²⁵ Politik identitas yang dimaksud ialah pengkategorian politik berdasarkan agama yang ada di Kota Banjarmasin.
5. Pemilu atau Pemilihan Umum pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu yang dimaksud ialah Pemilu 2024.
6. Partisipasi Pemilih ialah merupakan aktivitas individu warga negara menggunakan hak suara atau pemberian suara (*voting*) dalam pemilu

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 80.

²⁵ Agnes Heller dan Sonja Punsher, "Biopolitical Ideologies and Their Impact on the New Social Movements," dalam *A New Handbook of Political Societies* (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. ix.

(legislatif, presiden, dan kepala daerah).²⁶ Partisipasi pemilih yang dimaksud ialah penggunaan hak suara pada Pemilu 2024.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama pada Pemilu 2024” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anang Firdaus, dosen dari IAIN Al Fatah Jayapura dengan judul “Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia” *Kontekstualita* Volume 29 Nomor 1 (2014).²⁷

Artikel jurnal ini membahas tentang peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di berbagai daerah di Indonesia dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja FKUB di masing-masing daerah. Adapun persamaan artikel jurnal ini dengan tulisan peneliti ialah sama-sama membahas peran FKUB dari sisi menjaga keragaman beragama. Namun, perbedaannya ialah artikel jurnal ini

²⁶ Nora Eka Putri, “Dampak Literasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu,” *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5, no. 1 (15 Mei 2017), hlm. 56

²⁷ Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 29, no. 1 (2014): hlm. 145717.

membahas menjaga keragaman beragama secara umum, sedangkan peneliti melihat dari sisi menghindari politik identitas yang dapat mengganggu keragaman beragama di Indonesia, dalam hal ini di Kota Banjarmasin.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Susi Rohayati, Husni Kurniawati, dan Muhamad Nafi Uz Zaman dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul “Implementasi *Merit System* dalam Rekrutmen Partai Politik untuk Menanggulangi Arus Politik Identitas di Indonesia” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1 Edisi 2 (Oktober 2020).²⁸

Artikel jurnal ini membahas tentang implementasi *merit system* atau lebih mengedepankan kepada penunjukan suatu jabatan tertentu karena prestasi atau kemampuannya untuk Menanggulangi arus politik identitas di Indonesia, sedangkan peneliti melihat peran FKUB Kota Banjarmasin untuk Menanggulangi politik identitas, bukan melalui suatu sistem.

3. Artikel prosiding yang ditulis oleh Rizal Habi Nugroho dengan judul “Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas” *Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang*.²⁹

Artikel prosiding ini membahas tentang praktik politik identitas serta peran Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dalam menanggulangi politik identitas, sedangkan peneliti melihat peran FKUB selaku forum,

²⁸ Muhammad Nafi Uz Zaman, Susi Rohayati, dan Husni Kurniawati, “Implementasi *Merit System* dalam Rekrutmen Partai Politik untuk Menanggulangi Arus Politik Identitas di Indonesia,” *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 1, no. 2 (10 Oktober 2020), hlm. 81–94.

²⁹ Rizal Habi Nugroho, “Peranan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Menanggulangi Politik Identitas,” *Prosiding Senaspolhi* 1, no. 1 (30 September 2018).

bukan melihat peran nilai atau falsafah negara Indonesia dalam menanggulangi politik identitas. Akan tetapi, titik persamaannya ialah membahas cara menanggulangi atau menghindari politik identitas.

4. Artikel prosiding yang ditulis oleh Adriana Grahani Firdausy, Maria Madalina, dan Muhammad Rustamaji dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan judul “Desa Konstitusi: Politik Pemerintahan Desa dalam Menanggulangi Diskrupsi Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa di Era Post Truth” *Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang*.³⁰

Artikel prosiding ini membahas tentang salah satu desa di Bali yang disebut sebagai desa konstitusi dengan melihat langkah politik pemerintah desa dalam menangkal dan mencegah perluasan beragam disrupsi dan bibit disintegrasi bangsa yang memanfaatkan politik identitas. Artinya, desa yang menyerap konsep Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara tingkat yudikatif diharapkan mampu mencegah arus politik identitas. Adapun peneliti mengambil peran FKUB selaku forum yang dinaungi oleh pemerintah daerah yang merupakan bagian dari tingkat eksekutif dalam mencegah politik identitas.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Thoriqul Huda dari IAIN Kediri dengan judul “Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan

³⁰ Adriana Grahani Firdausy, Maria Madalina, dan Muhammad Rustamaji, “Desa Konstitusi: Politik Pemerintahan Desa dalam Menanggulangi Diskrupsi Politik Identitas dan Disintegrasi Bangsa di Era Post Truth,” *Prosiding Senaspolhi* 1, no. 1.

Peluang FKUB Jawa Timur” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Volume 32, Nomor 2, Juli 2021.³¹

Artikel jurnal ini membahas tentang upaya FKUB Jawa Timur dalam melakukan strategi tantangan dan peluang memahamkan moderasi beragama karena melihat kondisi sosio-politik-agama yang selalu dibenturkan dengan isu keagamaan hingga menimbulkan politik identitas. Adapun peneliti juga mengangkat politik identitas dengan melihat peran FKUB dalam mengatasinya. Namun, daerah yang dilakukan penelitian berbeda.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penelitian ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merincikan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Teori Peran, Kendala & Strategi, Organisasi, Relasi Politik & Agama, Politik Identitas, Pemilihan Umum, dan Partisipasi Pemilih

³¹ M. Thoriqul Huda, “Pengarutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (31 Juli 2021), hlm. 283–300.

Bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui peran, kendala & strategi, organisasi, relasi politik & agama, politik identitas, pemilihan umum, dan partisipasi pemilih sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang ada.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan dibahas tentang Jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Peran, Kendala, dan Strategi FKUB Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama pada Pemilu 2024

Bab ini akan dianalisis setelah melakukan wawancara dan dokumentasi.

Bab V Penutup

Bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran.